



Strategi Pencapaian Swasembada Beras dan Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian

Oleh:

Dr. Ir. Abdul Munif, MSc.Agr.

Sekretaris Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian IPB

PENDAHULUAN

Periode 2007-2008 menjadi masa yang sulit bagi masyarakat dunia. Krisis minyak dunia yang sempat melonjakkan harga minyak sampai \$140/barel merembas menjadi krisis pangan. Karena mahalnnya harga minyak, beberapa bahan pangan dunia seperti kedelai, jagung, tebu, dan sebagainya dikonversi menjadi bio-energi. Akibatnya suplai pangan dunia menurun. Dan harga pangan dunia meningkat. Dampaknya paling dirasakan oleh negara importir pangan terutama pada masyarakat miskin dan rawan pangan.

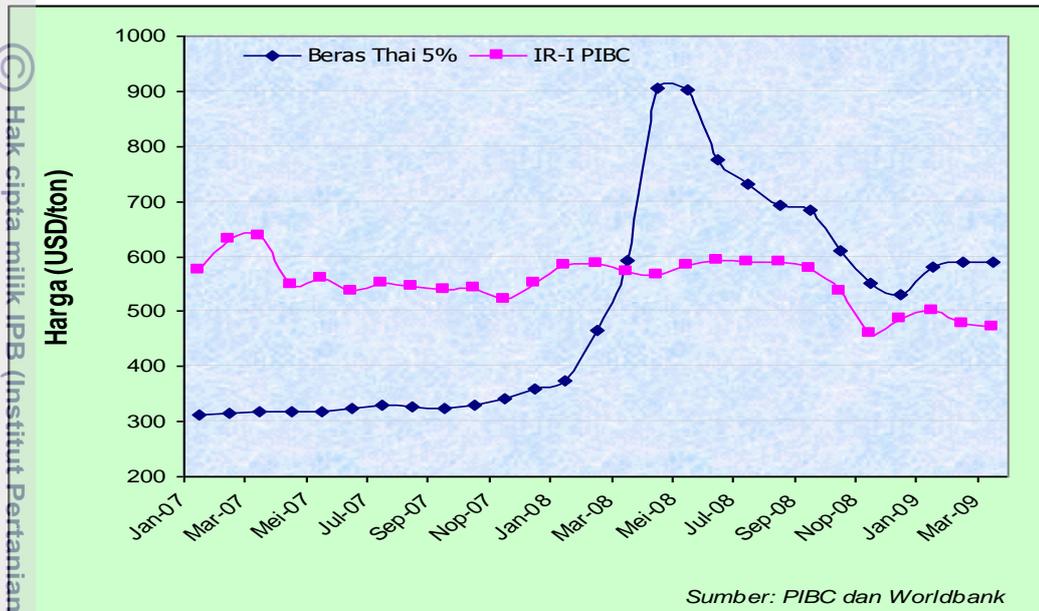
Tidak hanya kenaikan minyak dunia, perubahan iklim dunia juga menyebabkan krisis pangan. Kegagalan panen di sebagian negara penghasil pangan dunia karena perubahan iklim menyebabkan suplai pangan dunia menurun. Dan bencana yang diakibatkan perubahan iklim seperti El-Nino dan badai yang terjadi di AS menyebabkan permintaan pangan meningkat. Kekurangan suplai dan kelebihan permintaan menyebabkan harga pangan melambung tinggi.

Stok beras dunia akan mencapai titik terendah yang mendorong harga mencapai level tertinggi selama 20 tahun terakhir, sedangkan stok gandum mencapai titik terendah selama 50 tahun terakhir. Harga seluruh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pangan meningkat pada angka fantastis 75 persen dibandingkan dengan tahun 2000, beberapa komoditas bahkan lebih dari 200 persen.

Harga Beras Domestik dan Harga Paritas Beras International Januari 2008 - Maret 2009



Harga beras di dalam negeri cenderung stabil sedangkan harga paritas beras internasional cenderung meningkat (Peluang Ekspor)

Protes dan kerusuhan akibat harga pangan yang tinggi, yang dimulai pada akhir tahun 2007, telah terjadi di banyak sudut dunia. Pada Bulan Oktober 2007, terjadi demonstrasi besar di Bengali Barat, India, disusul di Senegal, Mauritania, Meksiko, dan Yaman. Di Kamerun pada bulan Januari 2008 terjadi kerusuhan besar yang memakan korban meninggal 20 orang, kemudian pada bulan yang sama di Burkina Faso, Afrika Barat. Di Malaysia, Filipina, Inggris, dan Skotlandia demonstrasi akibat krisis pangan juga terjadi meskipun tidak semasif sebagaimana yang berlangsung di Afrika.



Masalah dan Tantangan dalam Pembangunan Pertanian

Tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping munculnya persoalan-persoalan baru. Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan,

3 Disampaikan pada Seminar Nasional “Pembangunan Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan; Tanggal 7 Mei 2009 di Gedung University Club (UC) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Setiap krisis hampir selalu menghasilkan pemenang. Sayangnya, krisis pangan kali ini pemenangnya bukan petani negara berkembang, tetapi petani kaya di negara maju, investor dan pemain di bursa saham serta perusahaan multinasional. Tidak ada dasar kuat untuk menyatakan, lonjakan harga pangan seperti saat ini akan menguntungkan petani. Sebagian besar petani kita memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar (rata-rata nasional 0,36 hektar dengan jumlah petani 48 persen total penduduk) dan proporsi yang cukup besar di antaranya adalah buruh tani yang tidak berlahan. Kelompok petani berlahan sempit dan buruh tani itu justru akan menderita dampak terbesar karena sekitar 60 persen pendapatan mereka dibelanjakan untuk pangan.

Istilah *rice estate*, hibrida, agrotek, bioteknologi, dan transgenik diasumsikan oleh banyak pihak sebagai jawaban atas krisis pangan. Pada pertemuan tahunan investasi dunia ke-14 Empire Club Bulan Januari lalu dinyatakan hal yang sama, yaitu pemupukan lebih banyak, penggunaan benih rekayasa genetika, mesin pertanian yang lebih canggih, dan teknologi (pestisida dan herbisida).



sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan.

Dibawah ini disajikan beberapa tantangan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan:

- a. Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.
- b. Daya beli masyarakat umumnya masih rendah
- c. Ketergantungan terhadap konsumsi beras yang tinggi.
- d. Konversi lahan pertanian yang tinggi.
- e. Penurunan kualitas tanah dan air.
- f. Perubahan iklim global.
- g. Produksi pangan didominasi oleh petani kecil.
- h. Kurang terjangkanya petani terhadap sumber permodalan.
- i. Infrastruktur pertanian/pedesaan yang kurang memadai.
- j. Akses petani terhadap pasar domestik dan global terbatas.

Khusus untuk masalah lahan pertanian, rendahnya perluasan sawah irigasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh derasnya konversi lahan sawah beririgasi sejak lebih dari dua dasawarsa terakhir khususnya di pulau Jawa. Antara tahun 1978 – 1998, misalnya konversi lahan sawah irigasi adalah sebesar satu juta ha. Padahal kenyataannya sawah irigasi masih tetap merupakan sumberdaya lahan yang terpenting dalam mendukung produksi padi. Pangsa areal panen sawah masih memberikan kontribusi sebesar sekitar 90 persen sedangkan pangsa produksi berkisar 95 persen. Bila terjadi penurunan luas sawah irigasi yang tidak terkendali

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



maka akan mengakibatkan turunnya kapasitas lahan sawah untuk memproduksi padi. Lebih dari itu jika proses degradasi kualitas jaringan irigasi terus berlanjut maka eksistensi lahan tersebut sebagai sawah sulit dipertahankan. Yang segera akan terjadi adalah alih fungsi lahan sawah tersebut ke penggunaan lain (pertanian lahan kering ataupun ke peruntukan non pertanian).

Data empiris menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan produksi padi sawah 4,78 persen (Tahun 2003-2007), dibutuhkan pertumbuhan luas lahan sawah sebesar 2,47 persen. Hal ini menunjukkan penambahan luas lahan sawah masih sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi padi. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang cukup besar dalam pembangunan pertanian, dimana selama periode 2002-2007, rata-rata anggaran pertanian yang terbesar adalah untuk sarana dan prasarana (infrastruktur) yaitu 10,5 persen dan yang kedua adalah bantuan permodalan sebesar 8,5 persen. Urutan berikutnya adalah penyuluhan (2,7%), penelitian dan pengembangan (1,6%), dan pendidikan dan latihan (1,3%).

Tidak hanya dalam pengelolaan sumberdaya alam, dalam kebijakan insentif harga juga dilakukan seperti pada kebijakan insentif harga yang dapat dilihat dari peninjauan HPP setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan HPP gabah sebesar 10% akan mendorong peningkatan harga beras sebesar 8,1%. Peningkatan harga beras 10% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1%.

5 Disampaikan pada Seminar Nasional "Pembangunan Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan; Tanggal 7 Mei 2009 di Gedung University Club (UC) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Peningkatan harga beras 10% meningkatkan inflasi 0,52%. Inilah tantangan secara makro dalam perekonomian nasional bagaimana disisi sisi dapat meningkatkan harga untuk kepentingan petani namun dipihak lain ada sebagian masyarakat merasa dirugikan. Walaupun demikian keberhasilan pembangunan pertanian bisa mengakibatkan jumlah rumah tangga petani khususnya rumah tangga petani padi dan palawija meningkat sebesar 4,06%.

Beberapa kebijakan pokok yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian produksi pangan tersebut adalah: (a) Pengawasan Dan Bantuan Sarana Produksi: benih/bibit unggul, pupuk, alat mesin pertanian, obat hewan; (b) Bantuan Permodalan: fasilitas kredit kkp-E, BLM- KIP, UAP, DPM-LUEP, KP-ENRP, LM3, PMUK; (C) Perbaikan Infrastruktur Pertanian: perluasan Areal, JITUT, JIDES, TAM, jalan usaha tani, embung, pengembangan irigasi air tanah; (d) Fasilitasi Pengembangan Pasar dan Peningkatan Mutu Produk; (e) Inovasi dan Percepatan Diseminasi Teknologi; (f) Pendampingan dan pengawalan intensif: SL PHT, SL PHP, SL Iklim, penyuluh, tokoh masyarakat, aparat; (g) Penyediaan Dana Tanggap Darurat; dan (h) Koordinasi Intensif Pusat - Daerah.

Krisis Pangan Dunia dan Diplomasi Pertanian Indonesia

Dalam krisis pangan dunia, Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga pangan



dunia. Hal tersebut karena, ketergantungan bahan pangan pokok terhadap import relatif kecil dan produksi pangan meningkat.

Periode 2009, krisis minyak dan pangan bertransisi menjadi krisis finansial. Krisis finansial akibat dari kredit macet di sector perumahan di AS membawa dampak luas. Akibatnya transaksi ekspor-impor terkendala. Permintaan pasar dunia terhadap komoditas pertanian turun. Pemerintah ekspor turun, pertumbuhan ekonomi melambat, pemutusan hubungan kerja meningkat, dan pengangguran bertambah.

Kondisi ini akan berdampak pada munculnya krisis multidimensional global yang akan berpengaruh pada pembangunan pertanian di Indonesia khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Komitmen dunia untuk membangun ketahanan pangan diwujudkan melalui Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia dan Deklarasi Millenium (MDGs) Tahun 2000. Komitmen dunia tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai penurunan jumlah penduduk lapar hingga setengahnya pada Tahun 2015. Komitmen tersebut diimplementasikan oleh kelembagaan internasional FAO-PBB yang mendefenisikan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia (HAM) dan pemerintah wajib menyediakan pangan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Di Indonesia komitmen ketahanan pangan diwujudkan melalui International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESOC), kemudian diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak



baginya dan keluarganya atas pangan, serta setiap orang harus bebas dari kelaparan.

Pada FAO Conference ke-35 di Roma pada Nopember 2008 menyepakati *The Immediate Plan of Action (IPA) for FAO Renewal (2009-2011)* untuk meningkatkan peran FAO dalam menangani ketahanan pangan dunia. Pertemuan ketahanan pangan (*High Level Meeting on Food Security for All*) di Madrid pada Januari 2009, menghasilkan *triple track approach* yang terdiri dari *right to food*, *input production* dan *development assistance*. Selain itu juga menekankan pada pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan (pemerintah, sector swasta dan masyarakat madani/petani) dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi strategi terkait dengan sector pertanian dan ketahanan pangan. ASEAN Summit di Bangkok pada Maret 2009, kepala Negara ASEAN menyepakati *The ASEAN Integrated Food Security Framework and Strategic Plan of Actions*, berisi kesepakatan untuk saling membantu dalam mewujudkan stabilitas pasokan pangan dan akses pangan rumah tangga. Pertemuan UN-ESCAP ke-65 di Bangkok pada April 2009 berisi ketahanan pangan harus ditangani secara regional terutama terkait dengan kerja sama dan harmonisasi dalam kebijakan makro ekonomi, perdagangan dan investasi, transportasi, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup serta pembangunan social.

Mengamati perkembangan masalah krisis dunia, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dituntut berperan aktif. Indonesia berinisiatif dan berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional untuk mencapai



ketahanan pangan dunia yang difasilitasi oleh FAO, IFAD and WFP. Di ASEAN Indonesia juga telah berinisiatip dan berpartisipasi aktif untuk membangun “*integrated food security system*”. Indonesia merupakan salah satu negara pencetus “*The ASEAN Integrated Food Security Framework and Strategic Plan of Actions*” untuk menjamin stabilitas suplai dan akses rumah tangga terhadap pangan. Indonesia and FAO telah menandatangani *LOI* yang menyatakan Indonesia bersedia mengirim tenaga ahli dan menyiapkan batuan teknis dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan.

Walaupun Indonesia aktif berperan di dunia internasional, Indonesia tetap berkomitmen terhadap ketahanan pangan dalam negeri. Komitmen ketahanan pangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Departemen Pertanian menterjemahkan ketahanan pangan tersebut sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal; yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya local. Pembangunan Ketahanan Pangan tersebut harus memenuhi beberapa faktor di yaitu: Cakupan luas, Keterlibatan lintas sektor, Multidisiplin, Penekanan pada basis sumber daya lokal (impor pangan: the last resort).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Selain ketahanan pangan dunia, Indonesia juga berkomitmen pada kemandirian pangan dalam negeri. Komitmen kemandirian pangan dalam negeri tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal; yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Impor pangan sangat dihindari dan sifatnya sebagai alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam negeri, yang diatur agar tidak merugikan kepentingan produsen pangan di dalam negeri, yang mayoritas petani skala kecil, juga kepentingan konsumen khususnya kelompok miskin.

Ketahanan pangan menjadi hal yang penting, mengingat kekurangan pangan berimplikasi pada ekonomi, politik dan social. Dampak ekonomi kekurangan pangan menyebabkan inflasi tinggi. Dampak politik kekurangan pangan menyebabkan goyangnya pemerintah. Dampak social kekurangan pangan menyebabkan rentannya hubungan horizontal di masyarakat. Pendek kata ketahanan pangan menyebabkan stabilitas nasional menjadi goyah.

Sebenarnya ketentuan mengenai tanggungjawab ketahanan pangan telah diatur dalam UU Pangan No 7 tahun 1996. Dalam UU tersebut tanggungjawab ketahanan pangan dilimpahkan tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah dalam hal bertanggung jawab menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan



pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Sedangkan masyarakat berperan menyelenggarakan produksi, penyediaan, perdagangan, dan distribusi serta sebagai konsumen.

Kedaulatan Pangan

Berdasarkan pendekatan sejarah, krisis pangan suatu bangsa ternyata bermuara pada situasi "tidak berdaulat atas pangan". Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa/masyarakat untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional.

Terdapat tujuh prinsip tentang kedaulatan pangan (Via Campesina), diantaranya adalah:

1. hak akses ke pangan;
2. reformasi agraria;
3. penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;
5. pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
6. melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan
7. pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.



Jepang baru-baru ini mengeluarkan program mengganti tepung gandum dengan tepung umbi sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kedaulatan pangan. Perubahan paradigma dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan tampaknya perlu dimulai untuk menyelamatkan pangan dan petani kita.

Pembangunan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional semakin penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri/biofuel, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, dimana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan.



Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk: (a) meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, (b) menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka, dan (c) meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industrial. Secara operasional pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Departemen Pertanian telah menyusun Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (2005 - 2025), Jangka Menengah (2005-2009) dan tahunan. Adapun sasaran jangka panjang pembangunan pertanian, adalah : (1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing; (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (3) Terciptanya



kesempatan kerja bagi masyarakat pertanian serta (4) Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US\$ 2500/kapita/tahun.

Tujuan jangka menengah pembangunan pertanian (2005-2009) adalah : (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuh-kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintah menyusun strategi, kebijakan dan mengimplementasikan berbagai program/kegiatan pembangunan pertanian, baik lintas subsektor maupun program subsektor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, ada tiga kebijakan utama yang diimplementasikan Departemen Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan; (2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian; (3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut ada dua strategi besar yang ditempuh Departemen Pertanian. Pertama, memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa,

ditempuh dengan strategi : (1) Penyediaan/perbaikan infrastruktur; (2) Penguatan kelembagaan; (3) Perbaikan sistem penyuluhan; (4) Penanganan pembiayaan pertanian; (5) Fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Kedua, melakukan Akselerasi pembangunan pertanian, yang ditempuh melalui strategi, yaitu: a) melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat, b) padanan satu desa – satu penyuluh, c) mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya, d) fokus komoditas, e) perencanaan berdasarkan master plan dan road map, f) penguatan sistem Monitoring dan Data Base, dan g) pengarusutamaan gender dan pendekatan sosial budaya.

Komoditas	Target	Sasaran 2009	Fokus Propinsi
1. Padi	Swasembada berkelanjutan	63-64 juta ton	NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Gorontalo
2. Jagung	Swasembada 2007/2008	18 juta ton	Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Lampung, NTT, Sulawesi
3. Kedelai	Swasembada 2011	1,5 juta ton	NAD, Bengkulu, Lampung, Sumsel, Jambi, Jabar, Jateng, Jogja, Jatim, Kalsel, NTB, Papua
4. Gula	Swasembada 2009	3,3 juta ton	Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulawesi, Maluku, Papua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5. Daging sapi	Berkecukupan 2010	400 ribu ton	Sumut, NAD, Sumsel, Lampung, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, Kassel, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, NTT
----------------	-------------------	--------------	---

Lima Komoditas Pangan Strategis Nasional

Dengan beragamnya jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan strategi yang tepat dalam menentukan pilihan komoditas yang prioritas untuk dikembangkan. Prioritas penanganan difokuskan pada komoditas pertanian yang secara nasional dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, maupun masyarakat konsumen. Sehubungan itu, telah dirumuskan lima komoditas pangan utama yang diprioritaskan dengan sasaran akhir sebagai berikut:

(a) padi dengan sasaran swasembada berkelanjutan; (b) jagung dengan sasaran swasembada tahun 2007-2008; (c) kedele dengan sasaran swasembada tahun 2015; (d) gula dengan sasaran swasembada tahun 2009; dan (e) daging sapi dengan sasaran mencapai kecukupan tahun 2010.

Pencapaian Hasil Sektor Pertanian

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2007 s/d 2008 mengalami pertumbuhan yang mengesankan yaitu sekitar 4.41 persen. Selain itu berdasarkan data kemiskinan tahun 2005-2008, kesejahteraan penduduk perdesaan dan perkotaan membaik secara berkelanjutan. Berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa yang paling besar kontribusinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin adalah

16 Disampaikan pada Seminar Nasional "Pembangunan Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan; Tanggal 7 Mei 2009 di Gedung University Club (UC) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

pertumbuhan sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam menurunkan jumlah penduduk miskin mencapai 66%, dengan rincian 74% di perdesaan dan 55% di perkotaan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani secara konsisten mengalami peningkatan selama periode tahun 2006-2008 dengan pertumbuhan sebesar 2,52 persen per tahun. Dengan kinerja yang kondusif seperti itu, neraca perdagangan komoditas pertanian mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2005-2008 dengan rata-rata pertumbuhan 29,29 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian 1,56%/tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan total angkatan kerja (1,24%/tahun) dan tenaga kerja non pertanian yang hanya sekitar 0,98%/tahun. Melihat kondisi tersebut mengakibatkan. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi sektor pertanian tahun 2005 – 2007 mencapai 172,8%/tahun, lebih tinggi dibanding sektor lain.

Komoditas	Produksi Pangan (2005-2008) (dalam 000 tahun)					
	2005	2006	2007	2008	Pertumbuhan 2005 - 2008	Pertumbuhan 2007 -2008
1. Padi	54.151	54.455	57.157	60.251	3,65	5,41
2. Jagung	12.524	11.609	13.288	16.324	10,00	22,85
3. Ubikayu	19.321	19.987	19.988	21.593	3,83	8,03
4. Kedelai	808	748	593	776	0,90	30,86
5. Gula	2.242	2.307	2.450	2.597	5,03	6,00
6. CPO	11.862	13.391	14.152	17.110	13,16	20,90
7. Daging	397	440	381	396	0,45	3,94

Selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi tanaman pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi padi meningkat rata-rata 2,78% per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008 (ARAM III), bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (4,46%). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini, sehingga tahun 2008 Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton. Keberhasilan tersebut telah diakui masyarakat internasional, sebagaimana terlihat pada Pertemuan Puncak tentang Ketahanan Pangan di Berlin bulan Januari 2009. Beberapa negara menaruh minat untuk mendalami strategi yang ditempuh Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Demikian pula produksi jagung meningkat 9,52% per tahun (dari 11,23 juta ton pipilan kering tahun 2004 menjadi 15,86 juta ton tahun 2008). Bahkan dibanding produksi jagung tahun 2007, peningkatan produksi jagung tahun 2008 mencapai 19,34% (naik 2,57 juta ton). Pencapaian produksi jagung tahun 2008 juga merupakan produksi tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Selanjutnya, produksi kedelai juga meningkat 2,98% per tahun dari 723 ribu ton biji kering tahun 2004 menjadi 761 juta ton biji kering tahun 2008 (ARAM III).

Peningkatan produksi tanaman pangan yang spektakuler tahun 2008 terutama padi, jagung, gula, sawit, karet, kopi, kakao dan daging sapi dan



unggas), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, Tingginya motivasi petani/pelaku usaha pertanian untuk memproduksi karena pengaruh berbagai kebijakan dan program pemerintah meliputi penetapan harga, pengendalian impor, subsidi pupuk dan benih, bantuan benih gratis, penyediaan modal, akselerasi penerapan inovasi teknologi, dan penyuluhan.. Kedua, perkembangan harga-harga komoditas pangan di dalam negeri yang kondusif sebagai refleksi dari perkembangan harga di pasar dunia dan efektifitas kebijakan pemerintah. Ketiga, kondisi iklim memang sangat kondusif dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musim kemarau relatif pendek.

Untuk komoditas sumber pangan lainnya, produksi gula/tebu juga meningkat 6,76% per tahun dari 2,05 juta ton tahun 2004 menjadi 2,85 juta ton tahun 2008 (ARAM III). Demikian juga untuk komoditas daging sapi, baik dari segi populasi maupun produksi daging meningkat cukup besar. Peningkatan populasi ternak mencapai 12,75% (dari 10,5 juta ekor tahun 2004 menjadi 11,87 juta ekor tahun 2008), sedangkan produksi daging sapi meningkat 3,83% (dari 339,5 ribu ton menjadi 352,4 ribu ton).

Jika dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN, produksi dan produktivitas pangan strategis Indonesia relatif lebih tinggi. Gambaran tentang produksi dan produktivitas padi dan jagung di beberapa Negara ASEAN berikut.

Data Produksi dan Produktivitas padi di ASEAN Tahun 2006:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Indonesia luas panen 11,786.43 ribu ha; produksi 54,454.937 ribu metrik ton; produktivitas 4,620 kg/ha;
2. Filipina luas panen 4,159.930 ribu ha; produksi 15,326.706 ribu metrik ton; produktivitas 3,684 kg/ha.
3. Thailand luas panen 9,524.846 ribu ha; produksi 30,945.774 ribu metrik ton; produktivitas 3,249 kg/ha;
4. Malaysia luas panen 658.200 ribu ha; produksi 2,202.000 ribu metrik ton; produktivitas 3,254 kg/ha;
5. Vietnam luas panen tidak diketahui, produksi 35,917.900 ribu metrik ton; produktivitas 4,981

Data Produksi dan Produktivitas Jagung di ASEAN Tahun 2006:

1. Indonesia luas panen 3,345.805 ribu ha; produksi 11,609.463 ribu metrik ton; produktivitas 3,470; kg/ha
2. Filipina luas panen 2,570.673 ha; produksi 6,082.109 ribu metrik ton; produktivitas 2,366 kg/ha;
3. Thailand luas panen 951.970 ribu ha; produksi 4,057.698 ribu metrik ton; produktivitas 3,913 kg/ha;
4. Malaysia luas panen 10.000 ribu ha; produksi 39.800 ribu metrik ton; produktivitas 3,980 kg/ha;
5. Vietnam luas panen tidak diketahui; produksi 3,819.400 ribu metrik ton; produktivitas 3,700 kg/ha.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 1997. Agenda 21 Indonesia. Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Maret 1997. Hal 251-278.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta
- Boer R. 2007. Fenomena perubahan iklim: Dampak dan strategi menghadapinya. *dalam*. Prosiding Seminar Nasional Sumberdaya lahan dan Lingkungan Pertanian, Bogor, 7-8 November 2007. Hal 107-126.
- Pratasida L, Wardhana BS. 2005. Tantangan-Peluang Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Globalisasi dan Permasalahan Lingkungan. *Dalam: Prospek dan Tantangan Pertanian Indonesia di Era Globalisasi*. PT AGRICON. Bogor. Hal. 71-93.
- Direktorat Perlindungan Tanaman. 2003. Evaluasi peran pengendalian OPT dalam pengamanan produksi padi secara nasional. Jakarta.
- Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura. 2007. Pedoman umum sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) hortikultura. Jakarta.
- Food Agriculture Organization of The United Nation (FAO-UN). 1999. International Plant Protection Convention: New Revised Text. Rome. Italy.
- IPCC. 2001. Climate change 2001. Impacts, adaptation and vurnerabilities, UK. Cambridge University Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2005. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan Indonesia 2005. Jakarta. 56p.
- Krisnamurthi B, Susila DAB, Kriswantriyono A. 2002. Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan. Pusat Studi Pembangunan IPB-Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. Jakarta. 262 p.
- Suyamto, dan Widiarta IN. 2007. Arah dan strategi pengembangan system produksi tanaman pangan berkelanjutan. *dalam*. Prosiding Seminar Nasional Sumberdaya lahan dan Lingkungan Pertanian, Bogor, 7-8 November 2007. Hal 65-86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Suryana, A. 2007. Strategi dan inovasi Iptek sumber daya lahan dalam menghadapi perubahan iklim global dan perbaikan kualitas lingkungan. *dalam*. Prosiding Seminar Nasional Sumberdaya lahan dan Lingkungan Pertanian, Bogor, 7-8 November 2007. Hal 87-105.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Untung K. 2005. Prinsip-prinsip Pengelolaan Bahan Kimia Secara Terpadu. *Dalam: Prospek dan Tantangan Pertanian Indonesia di Era Globalisasi*. PT AGRICON. Bogor. Hal. 98-111.

Wardoyo, SB. 2005. Pembangunan Pertanian dan perdesaan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran: Analisis ekonomi-politik kebijakan fiskal. *dalam*, Setiawan WA dan Wardoyo S: Prospek dan Tantangan Pertanian Indonesia di Era Globalisasi. PT AGRICON. Bogor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.